



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA



2019

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

Pengantar

Daftar isi

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	3
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
D. Indikator Kinerja Utama	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Matrik Indikator Kinerja Utama	13
B. Indikator Kinerja Utama.....	16
C. Sasaran Strategis PTUN Palangka Raya Tahun 2019.....	20
D. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2019.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
B. Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Rekomendasi	50

Lampiran

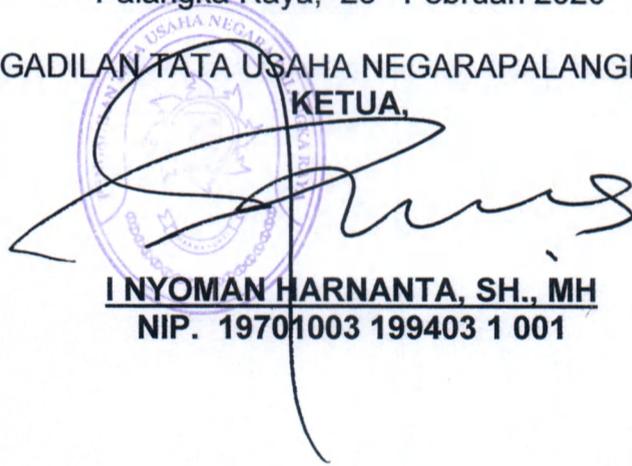
PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. Laporan ini disusun sebagai bentuk implementasi penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 4 (empat) lingkungan peradilan pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian dapat kami sampaikan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam penyelesaian laporan ini.

Palangka Raya, 28 Pebruari 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARAPALANGKA RAYA
KETUA,



I NYOMAN HARNANTA, SH., MH
NIP. 19701003 199403 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya resmi berdiri sejak tanggal 29 Oktober 1998 oleh Menteri Kehakiman RI yaitu **Bpk. Prof. Dr. H. MULADI, SH** sampai saat ini, wilayah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang terdiri 1 Kota dan 13 Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota BUNTOK;
2. Kabupaten Barito Timur dengan Ibu Kota TAMIANG LAYANG;
3. Kabupaten Barito Utara dengan Ibu Kota MUARA TEWEH;
4. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota KUALA KURUN;
5. Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota KUALA KAPUAS;
6. Kabupaten Katingan dengan Ibu Kota KASONGAN;
7. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibu Kota PANGKALAN BUN;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota SAMPIT;
9. Kabupaten Lamandau dengan Ibu Kota NANGA BULIK;
10. Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota PURUK CAHU;
11. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota PULANG PISAU;
12. Kabupaten Sukamara dengan Ibu Kota SUKAMARA;
13. Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota KUALA PEMBUANG;
14. Kota PALANGKARAYA

Propinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Palangka Raya terletak di bagian Tengah pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan propinsi Kalimantan Barat, sebelah timur dengan Kalimantan Selatan, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan propinsi Kalimantan Timur.

Propinsi Kalimantan Tengah secara geografis terletak di antara 0 45" Lintang Utara 3 30" Lintang Selatan dan 111" Bujur Timur, dengan luas daratan 153.564 km² atau hanya 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia.

Palangkaraya secara geografis terletak di antara 3⁰ 50' LS – 1⁰ 10' LU 110⁰ 20' – 116⁰ 0 BT dengan luas wilayah totalnya 157.983 km² dengan Jumlah Penduduk sekitar 2.202.599 Jiwa.

Daerah yang paling luas di propinsi Kalteng adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 23.700 km², kemudian Kabupaten Katingan dengan luas 17.800 km²

dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 16.496 km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Palangka Raya dengan luas 2.399,50 km².

Sebelum tahun 2002 semula terdiri 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya dan pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 13 kabupaten dan 1 kota, adapun kabupaten yang dimekarkan adalah Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Katingan ;

Daerah aliran sungai yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah adalah: Sungai Barito yang melintasi 4 kabupaten, Kahayan, Kapuas Kapuas, Sungai Mentaya, sungai Kumai, Sungai Seruyan, Sungai Katingan, Sungai Sabangau, Sungai Rungan, Sungai Busang dan puluhan anak sungai yang tersebar di 14 Kabupaten ;

Bahwa dengan keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di Propinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian sengketa-sengketa TUN sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Kalimantan Tengah.

Sebagai lembaga penyelenggara negara pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila di tata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada.

B. VISI DAN MISI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah salah satu Pengadilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada di Tingkat Pertama di Propinsi Kalimantan Tengah, dan sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merumuskan Visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dimana Visi tersebut relevan dengan rumusan Visi MARI yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 di Palembang yaitu :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Dan adapun Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah :

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Yang Agung dan Modern"

MISI

- 1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan, dan Modern.*
- 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.*
- 3. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.*
- 4. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas

Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Program kerja pembaruan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan termasuk independensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan sumber daya manusia.

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya harus mempertanggung jawabkan kinerjanya pada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah pada umumnya dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada khususnya.

Mahkamah Agung RI melalui cetak birunya atau Blue Print telah menuangkan berbagai macam usaha perubahan dan perbaikan demi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung diseluruh Indonesia secara ideal, dan melalui perubahan dan perbaikan tersebut semua Badan Peradilan diharapkan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi (IT) terpadu.

Aspek strategis organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses mencari keadilan dimana keadilan tersebut merupakan ujung tombak bagi pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mempunyai beberapa aspek strategi yang harus dijalankan untuk mencapai suatu pengadilan yang berkualitas. Beberapa aspek strategi tersebut adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat aspek tersebut mempunyai pertanggung jawaban yang nilainya dapat dijadikan acuan kedepan yang lebih baik. Kedua sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Indikator Kinerja Utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari rencana strategis kita. Dari rencana strategis yang disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga potensi-potensi yang ada.

Pembahasan dan potensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat dikelompokkan menjadi **analisis faktor internal** yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta **analisis faktor eksternal** yang terdiri dari peluang (opportunity) dan tantangan yang dihadapi seperti yang telah disinggung sedikit pada maksud dan tujuan adanya Blue Print Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mempunyai 2 analisis yang dapat dijabarkan untuk mencari solusi yang tepat guna penanggulangan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Analisis Faktor Internal

a. Kekuatan (strength)

Kekuatan-kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyangkut hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian. Hal-hal tersebut mencakup :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi Kalimantan Tengah.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

b. Kelemahan (weakness)

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat dirinci dalam beberapa aspek, sebagai berikut :

➤ Aspek Proses Peradilan

- Belum maksimalnya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

➤ Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

- Kurangnya tenaga administrasi diseluruh bagian baik Kepaniteraan dan bagian Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya.

➤ **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.

➤ **Aspek Sarana dan Prasarana**

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dalam arti masih kurang untuk menutupi kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang belum sesuai dengan standar prototype Mahkamah Agung RI.

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk melakukan reformasi / perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek sebagai berikut :

➤ **Aspek Proses Peradilan**

- Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

➤ **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

➤ **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

➤ **Aspek Sarana dan Prasarana**

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa internet dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

b. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tantangan-tantangan yang dihadapi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang akan dihadapi dan dipikirkan jalan keluarnya (solusinya) untuk dapat dilakukan reformasi / perbaikan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut :

➤ **Aspek Proses Peradilan**

- Belum adanya kepastian dari hasil tindak lanjut produk keadilan seperti yang diharapkan para pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya seperti halnya di pengadilan negeri.

➤ **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi.

➤ **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara gugatan lebih cepat.
- Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi

secara elektronik salah satunya adalah digunakannya aplikasi E-Court pada PTUN Palangka Raya.

➤ **Aspek Sarana dan Prasarana**

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Bahwa Sasaran (target) Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara ;
3. Peningkatan Kualitas SDM ;
4. Peningkatan Kualitas pengawasan ;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan ;
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;
8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN ;

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bahwa kedelapan Sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut diatas sudah dapat digambarkan Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya itu sendiri, dan

dapat pula dibuat suatu perkiraan seberapa besar target yang akan dicapai dengan penjelasan program sebagai berikut ;

1. Peningkatan penyelesaian perkara :

Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya setiap tahun mengalami pasang surut, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besar pun perkara yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :

- a. Jumlah perkara yang diterima ;
- b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan .

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

Indicator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat :

- a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
- b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat waktu
- c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
- d. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
- e. Jumlah penyampaian salinan putusan / salinan penetapan kepada para pihak
- f. Jumlah eksekusi tepat waktu

3. Peningkatan Kualitas SDM ;

Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami job masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan sebagai indikatornya adalah :

- a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan Tehnis
- b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non tehnis

4. Peningkatan Kualitas pengawasan ;

Pengawasan pada prinsipnya bertujuan agar suatu organisasi selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidak puasan atas pelayanan.

Adapun indicator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah :

- a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti
 - b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti
5. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap putusan ;
Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/2010 tentang keterbukaan Informasi pada badan peradilan maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap Pengadilan dan sebagai indicator pencapaian peningkatan aksebilitas tersebut dapat diukur melalui Prosentase perkara yang dapat dipublikasikan.
 6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ;
Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan manajemen peradilan yang tersedia melalui DIPA.
Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal maka indikator pengukurnya adalah Peningkatan Prosentase Penyerapan anggaran;
 7. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN
Bahwa dengan adanya DIPA 05, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dipercayakan untuk menyelenggarakan perkara-perkara Prodeo dan sebagai indikator kinerja bahwa DIPA 05 tersebut telah direalisasikan secara dioptimalkan maka dapat dilihat dari jumlah dana yang tersedia untuk perkara Prodeo
 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;
Prosentase penyelenggaraan operasional perkantoran yang berbasis Teknologi Informasi

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2015-2019.

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk tahap pertama harus dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan dasar dari berjalannya sebuah roda organisasi yang telah mempunyai tujuan, sasaran strategis dan juga program yang digunakan.

Dari indikator itu pula dapat dibuat sebuah gambaran kearah mana organisasi ini dijalankan. Pada setiap awal tahun , rencana kinerja harus sudah dibuat.

Berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah sebagai berikut :

No.	Rencana Strategis	Indikator Rencana Strategis
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat misin dan terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (posyankum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Prosentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti

A. MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menetapkan Matrik Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/264/K/KP.08.08/II/2018 tertanggal 23 Pebruari 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara : Tingkat Pertama	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Perbandingan antara perkara yang diterima dan jumlah perkara yang diputus	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara Sisa tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diputus	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang disidangkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Jumlah penyampaian fotocopy putusan kepada para pihak tepat waktu (pasal 51 A UU Peratun)	Perbandingan antara berkas perkara yang diputus dengan yang diminutasi	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
		c. Jumlah Penyampaian pemberi-tahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	Perbandingan antara persidangan dengan pemanggilan	Panitera	Laporan Bulanan
		d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan/Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	Perbandingan antara putusan dan pemberitahuan putusan	Panitera	Laporan Bulanan
		e. Jumlah berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan kasasi (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI	Panitera	Laporan Bulanan
		f. Jumlah berkas yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Peninjauan Kembali (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Tingkat Banding dan Mahkamah	Panitera	Laporan Bulanan

			Agung RI		
3.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4.	Peningkatan Akseibilitas Masyarakat terhadap peradilan (accses to justice)	Prosentase penyelesaian perkara yang dapat di publikasikan	Perbandingan prosentase putusan perkara yang sudah dapat di download di website (sesuai SK KMA No. 1-144 Th 2011 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/264/K/KP.08.08/II/2018 tertanggal 23 Pebruari 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rayadapat dilihat sebagai berikut :

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Peningkatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian	a. Prosentase usul kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan b. Prosentase usulan penyesuaian ijazah c. Prosentase usulan Karpeg, Karsu, Askes dan Taspen d. Prosentase usulan promosi dan Mutasi e. Prosentase usulan diklat perjenjangan f. Prosentase SPMT, SPMJ yang diterbitkan g. Prosentase Usulan Pensiun h. Prosentase kenaikan gaji berkala i. Prosentase usulan mendapatkan penghargaan Satya Lancanakarya	Untuk mengukur ketertiban administrasi	1. Sekretrais 2. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>Satya</p> <p>j. Prosentase DP3/SKP diberikan kepada pegawai</p> <p>k. Prosentase Surat Ijin Cuti diterbitkan</p> <p>l. Prosentase Pembuatan susunan pegawai (bezzeting)</p> <p>m. Prosentase pembuatan laporan bulanan kepegawaian</p> <p>n. Prosentase perekapan absensi</p> <p>o. Prosentase surat tugas yang diterbitkan</p> <p>p. Prosentase pembuatan usul jabatan struktural/fungsional</p> <p>q. Prosentase pembuatan surat keputusan kenaikan pangkat tenaga teknis dan non teknis gol. Ruang II/d dibawah</p> <p>r. Prosentase proses pembuatan surat penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan UU no 53 Tahun 2010</p> <p>s. Prosentase hasil putusan</p>		
--	--	--	--	--

		<p>pertimbangan jabatan/kepegangannya</p> <p>t. Prosentase pembuatan surat usul ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah</p>			
2	<p>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</p>	<p>a. Prosentase pengadaan pakaian dinas pegawai</p> <p>b. Prosentase gedung dan bangunan kantor terpelihara</p> <p>c. Prosentase kendaraan roda 4 terpelihara</p> <p>d. Prosentase kendaraan roda 2 terpelihara</p> <p>e. Prosentase tenaga honor dan supir</p> <p>f. Prosentase tenaga honor satpam</p> <p>g. Prosentase barang inventaris kantor yang terpelihara</p> <p>h. Prosentase surat masuk dan surat keluar di proses</p> <p>i. Prosentase asset BMN yang terdata dalam SIMAK</p> <p>j. Prosentase pengadaan fasilitas dan peralatan kantor</p>	<p>Untuk mengukur ketertiban administrasi</p>	<p>1. Sekretris</p> <p>2. Kasubbag Umum dan Keuangan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	Belanja Pegawai	Terpenuhinya Hak Para Pegawai	Pembayaran gaji, uang makan, Lembur dan Remunerasi para pegawai		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Penyerapan anggaran meningkat, terpenuhinya standar laporan pelaksanaan anggaran	Realisasi penyerapan anggaran yang akuntabel		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Peralatan dan fasilitas perkantoran	Meningkatkan semua fasilitas sarana dan prasarana kebutuhan kantor dan para pegawai	Menyediakan belanja barang dan modal untuk kebutuhan kantor		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**C. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKA RAYA TAHUN 2019**

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama maka **Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2019** adalah Sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Indeks esponden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 60% 1,5% (naik) 50 % 25 % 95 % 95 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu c. Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100% 100% 100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	0% 0%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan	➤ Prosentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti	89%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut serta dalam rangka mewujudkan visi pengadilan yaitu “ **Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Yang Agung**”, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel :

Jumlah perkara setiap tahun mengalami peningkatan, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besarpun perkara yang masuk maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 4 (empat) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :

- a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Prosentase penurunan sisa perkara
- d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
 - Banding
 - Kasasi
 - Peninjauan kembali
- e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Terwujudnya peradilan yang efektif dan efisien.

Indikator kinerja bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan tugasnya dengan melihat :

- a. Prosentase salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu.
- b. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus melalui Aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sesuai dengan perintah lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung telah melaksanakan pemberian akses bagi warga yang tidak mampu. Indikator kinerja dari sasaran strategis ke tiga ini adalah :

- a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan

Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Prosentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti

Untuk sasaran strategis kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menyiapkan sasaran yang harus dilaksanakan dan dicapai yaitu :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya manajemen pelayanan di PTUN Palangka Raya	a. Jumlah dokumen tata kelola dan tata administrasi b. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan dan pelatihan c. Penyelenggaraan operasional perkantoran	100% 100% 97,99%
2.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaana sesuai standar pelayanan yang prima	➤ Prosenase jumlah sarana dan prasarana yang ada sesuai standar mutu	99,99 %

**D. RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKA RAYA TAHUN 2019**

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	25 Perkara
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	4 Perkara
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	25 Perkara
		b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	30 Perkara
		c. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	25 Perkara
		d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	25 Perkara
		e. Jumlah eksekusi tepat waktu	2 Perkara
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	1 orang
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	1 orang

4.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %
		b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti	100 %
5.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %
6.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntansi pemerintah (SAP)	100 %
		b. Optimalnya penyerapan anggaran	100 %
7.	Program Peningkatan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan	100 %
8.	Program Peningkatan Manageman Peradilan Militer Dan TUN	Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan peradilan TUN	100 %

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya **Tahun 2019** dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2019 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini.

Tabel
Pengukuran Capaian Kinerja PTUN Palangka Raya Tahun 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	60 %	68,18 %	100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1,5 %	-133,33% (naik)	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi Peninjauan Kembali	50 % 25 % 95 %	46,67 % 50 % 96,67 %	46,67 % 50 % 96,67 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	95 %	79 %	79 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	89 %	79,17 %	79,17 %

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019, 2018 dan 2017

Perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mengalami kemajuan atau perkembangan menuju yang lebih baik. Perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat kita lihat dari perbandingan antara tahun 2017, 2018 dan tahun 2019.

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 60 % 1,5 % 50 % 25 % 95 % 95 %	100% 68,1% -133,33% Naik 46,67 % 50 % 96,67 % 79 %	100% 68,1% 100% 46,67 % 50 % 96,67 % 79 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	100% 100%	0% 0%	0% 0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkaramtata usaha negara yang ditindak lanjuti	89 %	79,17 %	79,17 %

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
TAHUN 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 60 % 1,5 % 50 % 25 % 95 % 95 %	100% 86,36 % 60 % Turun 50 % 21,05 % 97,37 % 0	100% 72,5% 0% 50 % 21,05 % 97,37 % 0
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	100% 100%	0% 0%	0% 0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkaramtata usaha negara yang ditindak lanjuti	89 %	86,84 %	86,84 %

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
TAHUN 2017**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	60 %	69,39 %	69,39%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1,5 %	-60 % Naik	100 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	50 %	58,82 %	58,82 %
		- Kasasi	25 %	42,86 %	42,86 %
e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	- Peninjauan Kembali	95 %	100 %	100 %	
		95 %	0	0	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	100%	0%	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkaramtata usaha negara yang ditindak lanjuti	89 %	91,18 %	91,18 %

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan Target Kinerja Jangka Menengah 2015 - 2019

Pengukuran realisasi kinerja dilihat beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun ini mendekati target dan ada beberapa bagian yang sudah memenuhi target, Ini menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan perencanaan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah seimbang.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan target kinerja jangka menengah tahun 2015-2019 dalam RENSTRA PTUN Palangka Raya adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	60 %	60 %	60 %	69,39 %	86,36 %	68,1%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1,5 %	1,5 %	1,5 %	-60 % Naik	60 % Turun	-133,33% Naik
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						
		- Banding	50 %	50 %	50 %	58,82 %	50 %	46,67 %
		- Kasasi	25 %	25 %	25 %	42,86 %	21,05 %	50 %
		- Peninjauan Kembali	95 %	95 %	95 %	100 %	97,37 %	96,67 %
e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	95 %	95 %	0	0	79 %		
2	Peningkatan	a. Persentase salinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)</p>	100%	100%	100%	0%	0%	0%
			100%	100%	100%	0%	0%	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	- Persentase putusan perkaramtata usaha negara yang ditindak lanjuti	89%	89%	89%	91,18%	86,84%	79,17%

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

4.1. Analisis keberhasilan kinerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat capaian kinerja/ keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian yang baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan di tingkat pertama.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menilai keberhasilan kinerja itu dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah dapat mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2015 - 2019.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melakukan analisis dan evaluasi atas hasil capaian kinerja tahun 2019, sehingga mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada rencana strategis kinerja tahun 2015-2019.

➤ Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja Perkara

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menggunakan indikator kinerja utama untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (clearance rate) yaitu perbandingan jumlah perkara masuk dan putus.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sudah dikatakan berkinerja baik dengan nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 60%. Penetapan target minimal clearance rate 60% ini karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih memiliki tunggakan perkara. Tunggakan perkara tersebut dapat diselesaikan semua sesuai waktu dan menangani perkara

yang masuk sesuai aturan yang telah ditetapkan dan berusaha untuk meminimalkan tunggakan menjadi lebih rendah.

a. Perkara Gugatan

Perkara gugatan yang tersisa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dari Tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA AKHIR
2017	6	43	28	6	15
2018	15	29	31	7	6
2019	6	38	24	6	14

b. Perkara Banding

Perkara Banding yang tersisa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dari Tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2017	14	12	1
2018	19	23	0
2019	16	14	0

c. Perkara Kasasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai pengadilan tingkat pertama selama tahun 2017, 2018 dan 2019 telah menerima permohonan kasasi dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2017	8	2	-
2018	15	11	-
2019	8	8	-

d. Perkara peninjauan Kembali (PK)

Keadaan perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2017	0	-	-
2018	6	-	-
2019	1	-	-

e. Perkara yang dimohonkan eksekusi

Jumlah perkara gugatan yang dimohonkan eksekusi oleh pihak selama tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2017	3	-	-
2018	5	-	-
2019	5	-	-

f. Keuangan Perkara

Keadaan keuangan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka raya selama periode Januari s.d Desember 2019 sebagai berikut :

- Saldo Awal : Rp. 85.712.650,-
- Penerimaan : Rp. 83.628.700,- +
- Jumlah : Rp. 169.341.350,-
- Pengeluaran : RP. 143.745.700,- -
- Saldo : RP. **25.595.650,-**

g. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2019 adalah tidak ada pengaduan yang diterima. Sesuai dengan pedoman Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

NO.	PENGADUAN	JUMLAH SURAT
1	Pengaduan yang masuk	: Nihil
2	Pengaduan yang sudah diselesaikan	: Nihil
3	Pengaduan yang masih diproses	: Nihil
4	Pengaduan yang diteruskan ke Bawas MARI	: Nihil
5	Pengaduan yang tidak layak ditindak lanjuti	: Nihil

4.2. Analisis Kegagalan

Ada beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau belum mencapai prosentase maksimal yaitu salah satunya kegiatan penurunan sisa perkara yang ada di Pengadilan tata Usaha Negara Palangka Raya dimana belum mencapai hasil yang memuaskan yaitu penurunan sisa perkara yang diharapkan setiap tahun turun meskipun hanya 0,001%. Penurunan sisa perkara setiap tahun tidak dapat dipenuhi sesuai target. Karena perkara yang masuk setiap tahunnya juga berubah dan perkara yang dihadapi kualitasnya berbeda, Ada yang butuh waktu yang cukup untuk penyelesaiannya.

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan juga menjadi sorotan yang utama dikarenakan putusan akhir pengadilan belum semua dijalankan eksekusinya oleh pihak tergugat. Ini yang menjadikan masalah, tidak adanya sanksi bagi pihak Tergugat yang belum melaksanakan eksekusi apalagi tidak melaksanakan eksekusi, ini membuktikan bahwa putusan pengadilan belum diterima oleh Tergugat dalam hal ini pihak pemerintah, Karena jika menjalankan putusan pengadilan dengan mengabaikan eksekusinya membuat nilai kerja pihak pemerintah buruk di mata masyarakat. Dua hal inilah yang menjadi ada sedikit kegagalan dalam menjalankan kinerja untuk memenuhi target yang sudah ditentukan dalam sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

➤ Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor-faktor sumber daya yang memiliki andil dan menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional.
2. Sulitnya minta tambahan formasi pegawai dimana jumlah pegawai yang ada terutama staf tidak dapat mencukupi dibanding dengan pekerjaan yang ada.

3. Penempatan formasi pegawai baru ditetapkan oleh pusat, tidak memenuhi aspirasi akan permohonan penambahan formasi pegawai.
4. Kurangnya kualitas sumber daya manusia.

Dengan tenaga yang minim berusaha untuk bisa melakukan semua pekerjaan itu dengan baik. Dengan pendekatan yang baik yang dilakukan pimpinan kantor semua dapat diatasi tanpa beban. Tugas pokok dan fungsi yang ada telah mendapat keberhasilan dengan ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2019 maupun sasaran strategis jangka menengah.

Dalam menjawab berbagai permasalahan tentang sumber daya tersebut, maka dibutuhkan suatu langkah-langkah antara lain :

1. Penempatan formasi pegawai baru harus memperhatikan peta kekuatan pegawai pada masing-masing satuan kerja.
2. Dalam menempatkan pegawai sedapat mungkin mempertimbangkan aspirasi satuan kerja di daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Mengusulkan penambahan pegawai dan menerima pegawai melalui jalur mutasi.
5. Mengusulkan peningkatan anggaran belanja pada DIPA pada tahun anggaran 2020 khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk realisasi anggarannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengajukan anggaran DIPA yang telah diatur sebaik mungkin untuk keperluan kantor. Pengajuan ini sesuai dengan rencana strategis

dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Terpenuhinya sasaran strategis yang ada indikator kinerja utama membawa dampak positif bagi pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Anggaran yang diajukan juga dipergunakan di bagian kepaniteraan perkara maupun hukum untuk kemajuan pelayanan terhadap masyarakat terutama para pencari keadilan.

➤ **Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mempunyai rencana program atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2019 dan untuk jangka menengah tahun 2015 – 2019.

Program atau kegiatan ini sangat menunjang sekali untuk keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ke masa yang akan datang. Program-program ini diantaranya yang sangat diperlukan yaitu :

1. program penyelesaian perkara,
2. peningkatan tertib administrasi dan
3. Tertib dokumen tata kelola
4. Kualitas sumber daya manusia.
5. Operasional perkantoran
6. Jumlah sarana dan prasarana.

Penyelesaian perkara ini ditujukan untuk para pencari keadilan agar merasa dilayani dengan baik dan merasa puas, Pelayanan penyelesaian perkara ini harus didukung adanya kualitas sumber daya manusia yang memenuhi syarat kejujuran, kepintaran. Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk tertib administrasi perkara. Kualitas sumber daya manusia yang baik dan layak dapat menunjang keberhasilan suatu unit kerja.

Keenam kegiatan yang ada dalam program tersebut pelaksanaannya harus diawasi oleh instansi yang lebih tinggi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan tetap dijalurnya.

Kesemua program itu harus mendapat dukungan agar berjalan dengan baik, terutama dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis baik dari Mahkamah Agung RI ataupun dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Pemenuhan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk peningkatan / keberhasilan program yang dibuat dan dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Pencapaian perjanjian kinerja itu telah tercantum dalam program / kegiatan yang ada dan menunjang keberhasilan peradilan terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 mengacu kepada Undang-Undang RI, Peraturan Presiden RI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 seperti :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

7. DIPA BUA Tahun Anggaran 2019 No. DIPA-005.01.2.578843/2019 Tanggal 05 Desember 2018 dan DIPA Dirjenmiltun Tahun Anggaran 2019 No. DIPA-005.05.2.578844/2019 Tanggal 05 Desember 2018;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 55/PA/SK/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui DIPA Tahun 2019 No. DIPA-005.01.2.578843/2019 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2019 Tanggal 05 Desember 2018 mempunyai 3 (Tiga) Program untuk kelancaran dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01).

Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdapat kegiatan :

❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :

- Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah (1066.970) dengan sub keluaran :
 - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (1066.970.053).
- Layanan Perkantoran (1066.994) dengan sub keluaran :
 - Gaji dan Tunjangan (1066.994.001)
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (1066.994.002)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02).

Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdapat kegiatan :

❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :

- Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1071.951) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (1071.951.052)
 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (1071.951.053)
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (005.05.09).

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan :

- ❖ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran :
 - Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu (1059.001) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pradilan TUN (1059.001.051).
 - Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.002) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo (1059.002.051)
 - Pos Bantuan Hukum (1059.003) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (1059.003.051)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui **DIPA BUA Tahun 2019 No. DIPA-005.01.2.578843/2019 Tanggal 05 Desember 2018** dengan nilai pagu awal Rp. 4.711.392.000,- mengalami revisi DIPA sebanyak 3 kali, Sedangkan untuk **DIPA Dirjenmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2019 Tanggal 05 Desember 2018** dengan nilai pagu Rp. 43.300.000,- tidak ada melakukan revisi anggaran.

Adapun perincian dari DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2019 tanggal 05 Desember 2018 sampai pada Revisi ke-3 dan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-

005.05.2.578844/2019 tanggal 05 Desember 2018 menurut Program, Kegiatan dan Keluaran adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 4.127.846.000.

Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdapat kegiatan :

❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :

- Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah (1066.970) dengan sub keluaran :
 - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (1066.970.053) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 5.040.000,-.
- Layanan Perkantoran (1066.994) dengan sub keluaran :
 - Gaji dan Tunjangan (1066.994.001) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 2.981.862.000,-.
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (1066.994.002) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 938.944.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 202.000.000,-.

Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdapat kegiatan :

❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :

- Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1071.951) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (1071.951.052) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 52.000.000,-.

- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (1071.951.053) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 150.000.000,-.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (005.05.09) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 43.300.000,-.

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan :

❖ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran :

- Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu (1059.001) dengan sub keluaran:

- Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pradilan TUN (1059.001.051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 8.500.000,-.

- Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.002) dengan sub keluaran :

- Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo (1059.002.051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 3.000.000,-.

- Pos Bantuan Hukum (1059.003) dengan sub keluaran :

- Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (1059.003.051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 31.800.000,-.

Dalam mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Belanja Pegawai = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pegawai seperti Gaji Pegawai, Tunjangan istri/suami, Tunjangan anak, Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional), Tunjangan Umum dan Tunjangan lainnya.
2. Belanja Barang = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja setiap bulannya untuk keperluan sehari – hari kantor

seperti Belanja Keperluan Perkantoran (ATK, internet, Satpam, Sopir dan Pesuruh), Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Aset Bergerak dan Belanja lainnya.

3. Belanja Modal = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Belanja Pengadaan Meubelair, Belanja Pengadaan Alat Pengolah Data, Belanja Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor).

Untuk Satuan Kerja Pengadailan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mengelola keuangan negara melalui 2 DIPA Tahun 2019 No. DIPA-005.01.2.578843/2019 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2019 Tanggal 05 Desember 2018 dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

D.1. Belanja Pegawai

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan jumlah sampai saat ini 20 Pegawai dan Hakim telah lakukan penganggaran untuk gaji, honorarium dan tunjangan dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2019 revisi ke 3 Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.981.862.000,-. Dalam pelaksanaan DIPA selama Tahun Anggaran 2019 telah menyerap dana sebesar **Rp. 2.972.067.988,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 517.895,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 9.794.012,- atau sebesar **99,69%** dari pagu DIPA yang ada.

D.2. Belanja Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memerlukan barang habis pakai untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan untuk belanja barang dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2019 Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 943.984.000,-. Dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama Tahun Anggaran 2019 telah

menyerap dana DIPA BUA sebesar **Rp. 923.104.949,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 20.879.051,- atau sebesar **97,79%** dari pagu DIPA BUA. Hal ini terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga mempengaruhi jumlah penyerapan pagu DIPA yang disediakan. Adapun Penyerapan belanja barang tersebut terdiri :

- Belanja Barang Operasional (5211) terserap sebesar Rp. 422.263.940,- atau 96,77% yang terdiri dari belanja :
 - Belanja Keperluan Perkantoran terserap sebesar Rp. 347.144.940,- atau 94,93% dari pagu DIPA.
 - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat terserap sebesar Rp. 3.788.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Honor Operasional Satker sebesar Rp. 38.080.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp. 33.251.000,- atau 99,66% dari pagu DIPA.
- Belanja Barang Persediaan (5218) terserap sebesar Rp. 35.918.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :
 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terserap sebesar Rp. 35.918.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp. 66.630.009,- atau 99,61% terdiri dari belanja :
 - Belanja Langganan Listrik terserap sebesar Rp. 66.142.870,- atau 99,93% dari pagu DIPA.
 - Belanja Langganan Telepon terserap sebesar Rp. 487.139,- atau 97,43% dari pagu DIPA.
- Belanja Pemeliharaan (5231) terserap sebesar Rp. 292.043.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :

- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terserap sebesar Rp. 148.393.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya terserap sebesar Rp. 12.600.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terserap sebesar Rp. 131.050.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) terserap sebesar Rp. 103.170.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

Sedangkan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2019 Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 43.300.000,-, realisasi anggaran **Rp. 39.800.000,-** atau **91,92%** dari pagu DIPA. hal ini disebabkan karena Pengamanan Sidang tidak ada digunakan dan penanganan perkara prodeo tidak ada karena tidak perkara prodeo yang masuk sehingga dana yang ada tidak dapat digunakan.

D.3. Belanja Modal

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan sarana dan prasarana untuk belanja modal untuk menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2019 Tahun Anggaran 2019 terdapat anggaran belanja modal dengan realisasi **Rp. 201.971.800,-** atau **99,99%** dari pagu DIPA.

**DAFTAR REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019
(dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	Bel. Pegawai (01)	2.981.862.000,-	2.972.067.988,-	(9.794.012,-)	99,69
2.	Bel. Barang (01)	938.944.000,-	920.024.949,-	(18.919.051,-)	97,99
	Bel. Barang (05)	43.300.000,-	39.800.000,-	(3.500.000,-)	91,92
3.	Bel. Modal (01)	202.000.000,-	201.971.800,-	(28.200,-)	99,99
	Jumlah Belanja	4.166.106.000,-	4.133.864.737,-	(32.241.263,-)	99,23

**DAFTAR REALISASI PNPB 2 DIPA PER 31 DESEMBER TAHUN 2019
(dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	DIPA 01	14.782.000,-	12.287.864,-	(2.494.136,-)	83,13
2.	DIPA 05	6.696.000,-	9.382.000,-	2.686.000,-	140,11
	Jumlah	21.478.000,-	21.669.864,-	191.864,-	100,89

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN :

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah salah satu Pengadilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada di Tingkat Pertama di Propinsi Kalimantan Tengah, dan sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merumuskan Visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dimana Visi tersebut relevan dengan rumusan Visi MARI yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 di Palembang yaitu : "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

Dan adapun Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah :

" TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA YANG AGUNG "

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Bahwa Sasaran (target) Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara ;
3. Peningkatan Kualitas SDM ;
4. Peningkatan Kualitas pengawasan ;
5. Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap putusan ;
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;

8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN ;

B. REKOMENDASI :

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEADAAN PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TAHUN 2017

1. SISA PERKARA TAHUN 2016, PERKARA MASUK, PUTUS & DICABUT TAHUN 2017

A. SISA PERKARA TAHUN 2016 : 6 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGGUGAT	TERGUGAT
01.	35/G/2016/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	02-11-2016	MASA' AD	BADAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
02.	37/G/2016/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	24-11-2016	ARMIN DIDIN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA UNGGANG
03.	38/G/2016/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	28-11-2016	JULIANUS LUMDIN MISAL, SKN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
04.	39/G/2016/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	15-12-2016	MERSY JULIANNE, ST	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
05.	40/G/2016/PTUN.PLK (PERIJINAN)	21-12-2016	PT. GUNUNG TABUR MAS SUKSES	1. BUPATI BARITO TIMUR; 2. PT. TIMBAWAN ENERGI INDONESIA. T.II INT;
06.	41/G/2016/PTUN.PLK (PERIJINAN)	21-12-2016	PT. GUNUNG TABUR MAS SUKSES	1. BUPATI BARITO TIMUR; 2. PT. MULTI PERKASA LESTARI. T.II INT;

B. PERKARA MASUK DITAHUN 2017 : 43 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGGUGAT	TERGUGAT
1	01/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	03-01-2017	Ir. FREE VYNOU, MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
2	02/G/KI/2017/PTUN.PL K (PERTANAHAN)	04-01-2017	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RATA	HUNDA Y MIHING
3	03/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	18-01-2017	1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI	KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG MUARA TEWEH, KABUPATEN BARITO UTARA

4	04/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	30-01-2017	BUDHI DILAN LAMAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
5	05/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	14-02-2017	MULIADI ISKANDAR RANGIN, SP	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
6	06/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	03-03-2017	CHAIRUL KASIM	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
7	07/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	03-03-2017	FANELSON	BUPATI GUNUNG MAS
8	08/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	10-03-2017	RACHMADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
9	09/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	05-04-2017	Drs. DAGUT, SH.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
10	10/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	05-04-2017	DARLUNG MINTO	CAMAT KURUN, KAB. GUNUNG MAS
11	11/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	05-04-2017	DAHLIM BANJARNAHOR, SE	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
12	12/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	20-04-2017	MIRHANUDIN AL FAIZAL	KEPALA DESA BANGKUANG, KEC. TEWANG SANGALANG GARING, KAB. KATINGAN
13	13/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	03-05-2017	ARTIN. DKK	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
14	14/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	05-05-2017	HAJJAH HERYATI ALIAS HAJJAH HERYATI MUDJIONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
15	15/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	17-05-2017	ABDUL HARIS LURAN BIN HARUN BIN HAMID	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU
16	16/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	18-05-2017	LUXKENLIE	KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG KOTA

				PALANGKA RAYA
17	17/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	02-06-2017	RACHMADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
18	18/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	13-06-2017	WIRATNO PRIHANDOKO	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PALANGKA RAYA
19	19/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	03-07-2017	Prof. Dr. SUANDI SIDAURUK, MPd	REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
20	20/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	12-07-2017	ABDUL HADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
21	21/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	21-07-2017	INDAH MULYANI	BUPATI PULANG PISAU
22	22/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	01-08-2017	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
23	23/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	04-08-2017	SILVANUS, S.Pd	KEPALA DESA MAJANGKAN, KEC. GUNUNG TIMANG, KAB. BARITO UTARA
24	24/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	14-08-2017	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
25	25/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	22-08-2017	ATISNO	1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LOHOI MANGKUTUP THN 2017; 2. CAMAT MENTANGAI; 3. KADIS PEMBERDAYAA MASYARAKAT DAN DESAB KAB. KAPUAS
26	26/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	02-10-2017	ELDONIEL ASI MAHAR	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
27	27/G/KI/2017/PTUN.PL K (LAIN-LAIN)	02-10-2017	KEPALA PERWAKILAN BPKP PROV. KALIMANTAN TENGAH	FAKHRUR RAZIE

28	<u>1/P/FP/2017/PTUN.PLK</u> <u>(PERMOHONAN)</u> <u>(LAIN-LAIN)</u>	<u>11-10-2017</u>	<u>IMAN WILLIYAN</u> <u>LANGKAH BAHAN, ST</u>	<u>KEPALA DINAS</u> <u>PERDAGANGAN DAN</u> <u>PERINDUSTRIAN PROV.</u> <u>KALIMANTAN TENGAH</u>
29	28/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	18-10-2017	HOLDI	1 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MANTANGAI HULU, KEC. MANTANGAI, KAB. KAPUAS THN 2017; 2 BPD MANTANGAI HULU
30	29/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	19-10-2017	WAHYUNI	1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LAPETAN, KEC. MANTANGAI, KAB. KAPUAS THN 2017; 2. BPD LAPETAN
31	30/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	23-10-2017	HARDY RAMPAY	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
32	31/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	31-10-2017	FRISBOY	1. BUPATI BARITO TIMUR; 2. KETUA BADAN PERMUSYAWARATA N DESA DAYU, KEC. KARUSEN JANANG; 3. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAYU, KEC. KARUSEN JANANG
33	32/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	02-11-2017	IMAN	BUPATI KAPUAS
34	33/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-11-2017	ASNAN	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
35	34/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-11-2017	- H. M. YAHYA - FAUJI	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

36	35/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-11-2017	MIHELDDY	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
37	36/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-11-2017	YERICHO ABEL	1. BUPATI KAPUAS 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP, KECAMATAN DADAHUP, KAB. KAPUAS
38	37/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	13-11-2017	1. PUJARI 2. DEDESAFARI	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
39	38/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	14-11-2017	TOPAN	BUPATI KAPUAS
40	39/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	22-11-2017	DJAUW HOI MIN Alias HENDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
41	40/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	30-11-2017	JONI SURYANATA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BAAMPAH KECAMATAN MENTAYA HULU, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
42	41/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	8-12-2017	WIYOTO, SH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
43	42/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	20-12-2017	TOPAN	BUPATI KAPUAS

Lampiran III.c

C. PERKARA YANG PUTUS DITAHUN 2017 : 28 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT	TERGUGAT
1	39/G/2016/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	02-03-2017	MERSY JULIANNE, ST	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
2	01/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	14-03-2017	FREE VYNOU, MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

3	35/G/2016/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	16-03-2017	MASA' AD	BADAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
4	02/G/KI/2017/PTUN.PL K (PERTANAHAN)	16-03-2017	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	HUNDA Y. MIHING
5	37/G/2016/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	11-04-2017	ARMIN DIDIN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA UNGGANG
6	03/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	15-05-2017	1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI	KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG MUARA TEWEH, KAB. BARITO UTARA
7	40/G/2016/PTUN.PLK (PERIJINAN)	24-05-2017	PT. GUNUNG TABUR MAS SUKSES	1. BUPATI BARITO TIMUR; 2. PT. TIMBAWAN ENERGI INDONESIA. T.II INT;
8	41/G/2016/PTUN.PLK (PERIJINAN)	24-05-2017	PT. GUNUNG TABUR MAS SUKSES	1. BUPATI BARITO TIMUR; 2. PT. MULTI PERKASA LESTARI. T.II INT;
9	04/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	31-05-2017	BUDHI DILAN LAMAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
10	11/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	07-06-2017	DAHLIM BANJARNAHOR, SE	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
11	07/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	13-06-2017	FANELSON	BUPATI GUNUNG MAS
12	06/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	05-07-2017	CHAIRUL KASIM	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
13	15/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	01-08-2017	ABDUL HARIS BIN LURAN BIN HARUN BIN HAMID	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU
14	09/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	08-08-2017	Drs. DAGUT, SH.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
15	12/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	08-08-2017	MIRHANUDIN AL FAIZAL	KEPALA DESA BANGKUANG KEC. TEWANG SANGALANG

				GARING, KAB. KATINGAN
16	10/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	09-08-2017	DARLUNG MINTO	CAMAT KURUN, KAB. GUNUNG MAS
17	13/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	22-08-2017	ARTIN. DKK	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
18	19/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	23-08-2017	Prof. Dr. SUANDI SIDAURUK, MPd	REKTOR UNIVERSITA PALANGKA RAYA
19	25/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	15-09-2017	A T I S T O	1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LOHOI MANGKUTUP TH 2017; 2. CAMAT MENTANGAI; 3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KAPUAS
20	14/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	27-09-2017	HAJJAH HERYATI ALIAS HAJJA HERYATI MUDJIONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
21	16/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	23-10-2017	LUXKENLIE	KEPALA KANTR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG KOTA PALANGKA RAYA
22	17/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	01-11-2017	RACHMADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
23	20/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	01-11-2017	ABDUL HADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
24	<u>1/P/PF/2017/PTUN.PLK</u> <u>(PERMOHONAN)</u> <u>LAIN-LAIN</u>	<u>08-11-2017</u>	<u>IMAN WILLIYAN</u> <u>LANGKAH BAHAN, ST</u>	<u>KEPALA DINAS</u> <u>PERDAGANGAN DAN</u> <u>PERINDUSTRIAN</u> <u>PROVINSI</u> <u>KALIMANTAN TENGAH</u>
25	21/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	15-11-2017	INDAH MULYANI	BUPATI PULANG PISAU

26	18/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	16-11-2017	WIRATNO PRIHANDOKO	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PALANGKA RAYA
27	23/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	30-11-2017	SILVANUS, S.Pd	KEPALA DESA MAJANGKAN, KECAMATAN GUNUNG TIMANG, KABUPATEN BARITO UTARA
28	27/G/KI/2017/PTUN.PL K (LAIN-LAIN)	12-12-2017	KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	FAKHRUR RAZIE

Lampiran III.d

D. PERKARA YANG DICABUT DI TAHUN 2017 : 6 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL DICABUT	PENGGUGAT	TERGUGAT
1	38/G/2016/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	04-01-2017	JULIANUS LUMDIN MISAL, SKN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
2	05/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	21-03-2017	MULIADI ISKANDAR RANGIN, SP	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
3	08/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	20-04-2017	RACHMADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
4	22/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	10-08-2017	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
5	26/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	31-10-2017	ELDONIEL ASI MAHAR	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
6	38/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	12-12-2017	TOPAN	BUPATI KAPUAS

2. BANDING YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2017

A. PERKARA BANDING YANG MASUK TAHUN 2017 : 14 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
1	39/G/2016/PTUN.PLK <u>(KEPEGAWAIAN)</u> MERSY YULIANNE, ST MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	03-03-2017	MERSY YULIANNE, ST	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
2	35/G/2016/PTUN.PLK <u>(PERTANAHAN)</u> MASA' AD MELAWAN BADAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	23-03-2017	BADAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	MASA' AD
3	01/G/2017/PTUN.PLK <u>(KEPEGAWAIAN)</u> Ir. FREE VYNOU, MT MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	24-03-2017	Ir. FREE VYNOU, MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
4	03/G/2017/PTUN.PLK <u>(PERTANAHAN)</u> 1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI MELAWAN KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG MUARA TEWEH, KAB. BARITO UTARA	26-05-2017	1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI	KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG MUARA TEWEH, KAB. BARITO UTARA
5	04/G/2017/PTUN.PLK <u>(PERTANAHAN)</u> BUDHI DILAN LAMAN MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	08-06-2017	BUDHI DILAN LAMAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

6	11/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) DAHLIM BANJARNAHOR MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	15-06-2017	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	DAHLIM BANJARNAHOR
7	12/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) MIRHANUDIN AL FAIZAL MELAWAN KEPALA DESA BANGKUANG KEC. TEWANG SANGALANG GARING, KAB. KATINGAN, PROV. KALIMANTAN TENGAH	18-08-2017	KEPALA DESA BANGKUANG KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING, KAB. KATINGAN, PROV. KALIMANTAN TENGAH	MIRHANUDIN AL FAIZAL
8	09/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) Drs. DAGUT, SH.,MT MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	21-08-2017	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	Drs. DAGUT, SH.,MT
9	13/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) ARTIN. DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	05-09-2017	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	ARTIN. DKK
10	25/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) ATISNO MELAWAN 1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LOHOI MANGKUTUP TH 2017 2. CAMAT MENTANGAI 3. KEPALA DINAS	29-09-2017	ATISNO	1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LOHOI MANGKUTUP TH 2017 2. CAMAT MENTANGAI 3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KAPUAS

	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KAPUAS			
11	14/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) HAJJAH HERYATI ALIAS HAJJAH HERYATI MUDJIONO MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	05-10-2017	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	HAJJAH HERYATI ALIAS HAJJAH HERYATI MUDJIONO
12	17/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) RACHMADI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	02-11-2017	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	RACHMADI
13	20/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) ABDUL HADI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	02-11-2017	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	ABDUL HADI
14	21/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) INDAH MULYANI MELAWAN BUPATI PULANG PISAU	24-11-2017	INDAH MULYANI	BUPATI PULANG PISAU

B. PERKARA BANDING YANG PUTUS TAHUN 2017 : 12 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
1	20/G/2016/PTUN.PLK 308/B/2016/PT.TUN.JKT (PERIJINAN) ROHIMAH MELAWAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	11-01-2017	ROHIMAH	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
2	24/G/2016/PTUN.PLK 331/B/2016/PT.TUN.JKT (PERIJINAN) PT. PADANG MULIA MELAWAN 1. BUPATI BARITO TIMUR 2. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	01-02-2017	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	PT. PADANG MULIA MELAWAN
3	22/G/2016/PTUN.PLK 325/B/2016/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) SYAHRUDIN MELAWAN BUPATI KAPUAS	27-02-2017	SYAHRUDIN	BUPATI KAPUAS
4	30/G/2016/PTUN.PLK 17/B/2017/PT.TUN.JKT (PERIJINAN) PT. USAHA HANDALAN SEJAHTRA MELAWAN BUPATI KAPUAS	09-03-2017	BUPATI KAPUAS	PT. USAHA HANDALAN SEJAHTRA

5	31/G/2016/PTUN.PLK 32/B/2017/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) DOON MELAWAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SAMBUNG TAMBUN, KEC. TEWAH, KAB. GUNUNG MAS	18-04-2017	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SAMBUNG TAMBUN, KEC. TEWAH, KAB. GUNUNG MAS	DOON
6	39/G/2016/PTUN.PLK 123/B/2017/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) MERSY YULIANNE, ST MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	14-07-2017	MERSY YULIANNE, ST	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
7	01/G/2017/PTUN.PLK 144/B/2017/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) Ir. FREE VYNOU, MT MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	24-08-2017	Ir. FREE VYNOU, MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
8	35/G/2016/PTUN.PLK 143/B/2017/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) MASA' AD MELAWAN KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	29-08-2017	KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	MASA' AD
9	03/G/2017/PTUN.PLK 200/B/2017/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) 1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI MELAWAN KEPALA KANTOR	10-10-2017	1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI	KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG MUARA TEWEH, KAB. BARITO UTARA

	AGRARIA DAN TATA RUANG MUARA TEWEH, KAB. BARITO UTARA			
10	04/G/2017/PTUN.PLK 224/B/2017/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) BUDHI DILAN LAMAN MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	30-10-2017	BUDHI DILAN LAMAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
11	11/G/2017/PTUN.PLK 229/B/2017/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) DAHLIM BANJARNAHOR, SE.,Msi MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	02-11 2017	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	DAHLIM BANJARNAHOR, SE.,Msi
12	12/G/2017/PTUN.PLK 306/B/2017/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) MIRHANUDIN AL FAIZAL MELAWAN KEPALA DESA BANGKUANG, KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING, KABUPATEN KATINGAN, PROV. KALIMANTAN TENGAH	7-12-2017	KEPALA DESA BANGKUANG, KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING, KABUPATEN KATINGAN, PROV. KALIMANTAN TENGAH	MIRHANUDIN AL FAIZAL

C. PERKARA BANDING YANG DICABUT TAHUN 2017 : 1 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL DICABUT	PEMBANDING	TERBANDING
1	19/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) Prof. Dr. SUANDI SIDAURUK, MPd MELAWAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA	23-10-2017	REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA	Prof. Dr. SUANDI SIDAURUK, MPd

Lampiran V

1. KASASI YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2017

A. PERKARA KASASI YANG MASUK TAHUN 2017 : 8 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN KASASI	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
1	30/G/2016/PTUN.PLK (PERIJINAN) PT. USAHA HANDALAN SEJAHTRA MELAWAN BUPATI KAPUAS	27-03-2017	PT. USAHA HANDALAN SEJAHTRA	BUPATI KAPUAS
2	02/G/KI/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA MELAWAN HUNDA Y MIHING	30-03-2017	HUNDA Y MIHING	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
3	35/G/2016/PTUN.PLK (PERTANAHAN) MASA' AD MELAWAN KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	25-09-2017	MASA' AD	KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

4	01/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) Ir. FREE VYNOU, MT MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	19-10-2017	Ir. FREE VYNOU, MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
5	03/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) 1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BARITO UTARA	13-11-2017	SYAHRUDIN EFENDI (T.II-INT)	1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI
6	11/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) DAHLIM BANJARNAHOR, SE.,MSi MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	29-11-2017	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	DAHLIM BANJARNAHOR, SE.,MSi
7	04/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) BUDHI DILAN LAMAN MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	4-12-2017	BUDHI DILAN LAMAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
8	27/G/KI/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) KEPALA PERWAKILAN BPKP PROV. KALIMANTAN TENGAH MELAWAN FAKHRUR RAZIE	22-12-2017	KEPALA PERWAKILAN BPKP PROV. KALIMANTAN TENGAH	FAKHRUR RAZIE

B. PERKARA KASASI YANG PUTUS TAHUN 2017 : 2 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
1.	05/G/2016/PTUN.PLK 15 K/TUN/2016 (PERTANAHAN) SAHAWIT E. UNJUNG MELAWAN BADAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	23-02-2017	SAHAWIT E. UNJUNG	BADAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
2	02/G/KI/2017/PTUN.PLK 322 K/TUN/2017 (PERTANAHAN) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA MELAWAN HUNDA Y MIHING	01-08-2017	HUNDA Y MIHING	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

Lampiran VI

1. PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN TAHUN 2017 : 0 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI	PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI	TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
		N I H I L		

Lampiran VII

1. EKSEKUSI YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2017 : 3 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN EKSEKUSI	PEMOHON EKSEKUSI	TERMOHON EKSEKUSI
1	020/IX/KI KALTENG-PS-A- M-A/2016 1. NFORMASI TENTANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN /IUP OPERSI PRODUKSI PT. BANGUN	07-02-2017	ALPRID, SPd, M.M	KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARITO TIMUR

	<p>NUSANTARA JAYA MAKMUR)</p> <p>2. INFORMASI TENTANG BUKTI PENETAPAN DANA JAMINAN REKLAMASI PASCATAMBANG PT. BANGUN NUSANTARA</p> <p><u>ANTARA :</u> ALPRID, SPd, M.M</p> <p><u>MELAWAN</u> KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARITO TIMUR</p>			
2	<p>021/IX/KI KALTENG – PS – A-M-A/2016</p> <p>1. INFORMASI TENTANG IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PT. BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR.</p> <p>2. INFORMASI TENTANG IZIN PEMBANGUNAN LIMBAH CAIR PT. WINGS SEJATI</p> <p>3. AMDAL DAN IZIN LINGKUNGAN PT. BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR</p> <p>ALPRID, SPd, M.M</p> <p><u>MELAWAN</u> KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. BARITO TIMUR</p>	07-02-2017	ALPRID, SPd, M.M	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. BARITO TIMUR
3	<p>25/G/2016/PTUN.PLK (INFORMASI NAMA DAN ALAMAT PEMBELI LELANG SECARA TERTULIS)</p>	14-03-2017	ROBBY CHARLES SOETA ;	DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

	ROBBY CHARLES SOETA MELAWAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA			
--	---	--	--	--

KEADAAN PERKARA TAHUN 2018

A. SISA PERKARA THN 2017 : 15 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
01.	24/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	14-08-2017	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
02.	28/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	18-10-2017	H O L D I, ST	BUPATI KAPUAS
03.	29/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	19-10-2017	WAHYUNI	1. BUPATI KAPUAS; 2. SARIYANTO
04.	30/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	23-10-2017	HARDY RAMPAY	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
05.	31/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	31-10-2017	FRISBOY	BUPATI BARITO TIMUR;
06.	32/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	02-11-2017	I M A N	BUPATI KAPUAS
07.	33/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-11-2017	ASNAN	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
08.	34/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-11-2017	- H. M. YAHYA - F A U J I	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
09.	35/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-11-2017	MIHELDY	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
10.	36/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-11-2017	YERICHO ABEL	1. BUPATI KAPUAS 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP, KECAMATAN DADAHUP, KAB. KAPUAS
11.	37/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	13-11-2017	1. P U J A R I 2. DEDE SAFARI	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

12.	39/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	22-11-2017	DJAUW HOI MIN Alias HENDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
13.	40/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	30-11-2017	JONI SURYANATA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BAAMPAH KECAMATAN MENTAYA HULU, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
14.	41/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	08-12-2017	WIYOTO, SH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
15.	42/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	20-12-2017	T O P A N, S.Pd	BUPATI KAPUAS

B. PERKARA MASUK TAHUN 2018 : 29 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/TERMOHON
1	1/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	05-01-2018	Ir. SILAS, ST	SEKRETARIS DAERAH KAB. BARITO SELATAN
2	<u>1/P//FP/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)</u>	<u>16-01-2018</u>	<u>IMAN WILLIYAN LANGKAH BAHAN, ST</u>	<u>KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIANN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</u>
3	2/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	30-01-2018	SYSWANSYAH, A.Md	BUPATI SERUYAN
4	3/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	30-01-2018	TAUFIK RAHMAN, ST	BUPATI SERUYAN
5	4/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	30-01-2018	EKO PURWANTO, ST	BUPATI SERUYAN
6	<u>5/G/KI/2018/PTUN.PLK (KOMISI INFORMASI)</u>	<u>05-02-2018</u>	<u>KEPALA KANTOR PERTANAHAN PALANGKA RAYA</u>	<u>MEYIWATI</u>
7	6/G/2018/PTUN.PLK (LELANG)	26-02-2018	PT. KARYA ANUGRAH PERSADA	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
8	7/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	26-02-2018	SALUNDIK, SH.,MH	KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGA PALANGKA RAYA

9	8/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	12-03-2018	MUHAJIRIN, SP	BUPATI SERUYAN
10	9/G/2018/PTUN.PLK (PERIJINAN)	22-03-2018	HAMSI	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
11	10/G/2018/PTUN.PLK (PERIJINAN)	27-03-2018	1. YUNARIS; 2. SENADI	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
12	<u>2/P//PW/2018/PTUN.PLK (WEWENANG)</u>	<u>18-04-2018</u>	<u>Ir. SILAS, ST</u>	
13	11/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	30-04-2018	YUDI PUNGAN, SE.,MS	KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA(YP-SEI PR)
14	12/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	04-06-2018	ANDRE ANTONONI, ST.,MT	REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
15	13/G/2018/PTUN.PLK (LELANG)	04-06-2018	PT. KARYA ANUGRAH PERSADA	KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA 02 UNIT LAYANAN PELELANGAN (ULP) MUARA TEWEH, KAB. BARITO UTARA
16	14/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	03-07-2018	TOTO HARTONO, SH.,MP	BUPATI BARITO SELATAN
17	15/G/2018/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	04-07-2018	DJOKO SUMANTRI, SE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
18	16/G/2018/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	16-07-2018	1. ANA JATMO 2. BUDIYANTO 3. EDYSON 4. DARSONO	KEPALA BPN/TATA RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
19	17/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	17-07-2018	SUPENDI BIN HINTING	KEPALA DESA KABUAN
20	18/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	23-08-2018	BUDIANTO, SH	BUPATI KATINGAN
21	<u>3/P//FP/2018/PTUN.PLK (PERIJINAN)</u>	<u>28-08-2018</u>	<u>PT. PRIMA BARA INDONESIA</u>	<u>GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH</u>
22	19/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	10-09-2018	Ir. SADAR ARDI	WALIKOTA PALANGKA RAYA
23	20/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	19-09-2018	MULIADI, S.Pd	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

24	21/G/2018/PTUN.PLK (PARTAI POLITIK)	10-10-2018	H. AMIR MAHMUD, SE.,MM	GUBERNUR KALIMANTAN TENTAH
25	22/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	19-10-2018	KARYADI, SE	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
26	23/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	25-10-2018	RIADI JUNIANNUR	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
27	24/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	7-12-2018	Ir. BONAPARTEI, M.Sc	GUBERNUR KALIMANTAN TENTAH
28	<u>25/G/KI/2018/PTUN.PLK</u> (KOMISI INFORMASI)	<u>12-12-2018</u>	<u>KEPALA KANTOR</u> <u>WILAYAH BADAN</u> <u>PERTANAHAN</u> <u>NASIONAL PROVINSI</u> <u>KALIMANTAN TENGAH</u>	<u>MUHAMMAD HABIBI</u>
29	26/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	21-12-2018	LIEM WAN HING, ST	GUBERNUR KALIMANTAN TENTAH

C. PERKARA YANG PUTUS DITAHUN 2018 : 31 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
01.	24/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	24-01-2018	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
02.	28/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	08-02-2018	H O L D I, ST	BUPATI KAPUAS
03	31/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	08-02-2018	FRISBOY	BUPATI BARITO TIMUR
<u>04</u>	<u>1/P//FP/2018/PTUN.PLK</u> (LAIN-LAIN)	<u>13-02-2018</u>	<u>IMAN WILLIYAN</u> <u>LANGKAH BAHAN, ST</u>	<u>KEPALA DINAS</u> <u>PERDAGANGAN DAN</u> <u>PERINDUSTRIANN</u> <u>PROVINSI KALIMANTAN</u> <u>TENGAH</u>
05	29/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	20-02-2018	WAHYUNI	1. BUPATI KAPUAS; 2. SARIYANTO
06	30/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	20-02-2018	HARDY RAMPAY	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
07	36/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	01-03-2018	YERICHO ABEL	1. BUPATI KAPUAS 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP, KECAMATAN

08	32/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-03-2018	IMAN	BU PATI KAPUAS
09	42/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	09-04-2018	T O P A N, S.Pd	BU PATI KAPUAS
10	39/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	10-04-2018	DJAUW HOI MIN Alias HENDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
11	41/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	10-04-2018	WIYOTO, SH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
12	33/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	11-04-2018	A S N A N	BU PATI KOTAWARINGIN TIMUR
13	34/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	11-04-2018	- H. M. YAHYA - FAUJI	BU PATI KOTAWARINGIN TIMUR
14	35/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	11-04-2018	MIHELDY	BU PATI KOTAWARINGIN TIMUR
15	1/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	12-04-2018	Ir. SILAS, ST	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
16	<u>5/G/KI/2018/PTUN.PLK</u> (KOMISI INFORMASI)	<u>12-04-2018</u>	<u>KEPALA KANTOR</u> <u>PERTANAHAN KOTA</u> <u>PALANGKA RAYA</u>	<u>MEYIWATI</u>
17	37/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	18-04-2018	- PUJARI - DEDE SAFARI	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
18	2/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	02-05-2018	SYSWANSYAH, A.Md	BUPATI SERUYAN
19	3/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	02-05-2018	TAUFIK RAHMAN, ST	BUPATI SERUYAN
20	4/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	02-05-2018	EKO PURWANTO, ST	BUPATI SERUYAN
21	40/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	03-05-2018	JONI SURYANATA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BAAMPAH KECAMATAN MENTAYA HULU, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
22	<u>2/P//PW/2018/PTUN.PLK</u> (LAIN-LAIN)	<u>17-05-2018</u>	<u>Ir. SILAS, ST</u>	

23	6/G/2018/PTUN.PLK (LELANG)	07-06-2018	PT. KARYA ANUGRAH PERSADA	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
24	8/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	26-06-2018	MUHAJIRIN, SP	BUPATI SERUYAN
25	7/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	05-07-2018	SALUNDIK, SH.,MH	KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA
26	11/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	16-08-2018	YUDI PUNGAN, SE.,MS	KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)
27	12/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	29-08-2018	ANDRE ANTONONI, ST.,MT	REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
28	<u>3/P//FP/2018/PTUN.PLK</u> <u>(PERIJINAN)</u>	<u>21-09-2018</u>	<u>PT. PRIMA BARA</u> <u>INDONESIA</u>	<u>GUBERNUR KALIMANTAN</u> <u>TENGAH</u>
29	14/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	11-10-2018	TOTO HARTONO, SH.,MP	BUPATI BARITO SELATAN
30	15/G/2018/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	21-11-2018	DJOKO SUMANTRI, SE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
31	16/G/2018/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	5-12-2018	1. ANA JATMO 2. UDIYANTO 3. EDYSON 4. DARSONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

D. PERKARA YANG DICABUT DI TAHUN 2018 : 7 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL DICABUT	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
1	10/G/2018/PTUN.PLK (PERIJINAN)	11-04-2018	1. YUNARIS 2. SENADI	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
2	9/G/2018/PTUN.PLK (PERIJINAN)	23-04-2018	HAMSI	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
3	13/G/2018/PTUN.PLK (LELANG)	17-07-2018	PT. KARYA ANUGRAH PERSADA	KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAN BARANG/JASA 02 UNIT LAYANAN PELELANGAN (ULP) DI MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA

4	17/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	20-07-2018	SUPENDI BIN HINTING	KEPALA DESA KABUAN
5	18/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	06-09-2018	BUDIANTO, SH	BUPATI KATINGAN
6	19/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	16-10-2018	Ir. SADAR ARDI	WALIKOTA PALANGKA RAYA
7	26/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	27-12-2018	LIEM WAN HING, ST	GUBERNUR KALIMANTAN TENTAH

E. PERKARA BANDING YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2018 : 19 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
01.	24/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) NONONG EKA CHANDRA MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR	06-02-2018	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
02	31/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) FRISBOY MELAWAN BUPATI BARITO TIMUR	20-02-2018	BUPATI BARITO TIMUR	FRISBOY
03	29/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) WAHYUNI MELAWAN 1. BUPATI KAPUAS 2. SARIYANTO	02-03-2018	WAHYUNI	1. BUPATI KAPUAS; 2. SARIYANTO
04	32/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) I M A N MELAWAN BUPATI KAPUAS	12-03-2018	BUPATI KAPUAS	I M A N
05	36/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) YERICHO ABEL MELAWAN BUPATI KAPUAS	12-03-2018	BUPATI KAPUAS	YERICHO ABEL

06	39/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) DJAUW HOI MIN Alias HENDRA MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR - T.II. INTERVENSI	12-04-2018 dan 23-04-2018	- T.II.INTERVENSI; - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURI	DJAUW HOI MIN Alias HENDRA
07	42/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) TOPAN, S.Pd MELAWAN BUPATI KAPUAS	17-04-2018	TOPAN, S.Pd	BUPATI KAPUAS
08	1/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) Ir. SILAS, ST MELAWAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	23-04-2018	Ir. SILAS, ST	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
09	41/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) WIYOTO, SH MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS	23-04-2018	WIYOTO, SH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
10	2/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) SYSWANSYAH, A.Md MELAWAN BUPATI SERUYAN	08-05-2018	BUPATI SERUYAN	SYSWANSYAH, A.Md
11	3/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) TAUFIK RAHMAN, ST MELAWAN BUPATI SERUYAN	08-05-2018	BUPATI SERUYAN	TAUFIK RAHMAN, ST
12	4/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) EKO PURWANTO, ST MELAWAN BUPATI SERUYAN	08-05-2018	BUPATI SERUYAN	EKO PURWANTO, ST
13	2/P//PW/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	30-05-2018	Ir. SILAS, ST (PEMOHON)	
14	6/G/2018/PTUN.PLK (LELANG) PT. KARYA ANUGRAH PERSADA MELAWAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	21-06-2018	PT. KARYA ANUGRAH PERSADA	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
15	7/G/2018/PTUN.PLK	09-07-2018	KETUA YAYASAN	SALUNDIK, SH.,MH

	(LAIN-LAIN) SALUNDIK, SH.,MH MELAWAN KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA		TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA	
16	11/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) YUDI PUNGAN, SE.,MS MELAWAN KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)	20-08-2018	YUDI PUNGAN, SE.,MS	KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)
17	14/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) TOTO HARTONO, SH.,MP MELAWAN BUPATI BARITO SELATAN	24-10-2018	TOTO HARTONO, SH.,MP	BUPATI BARITO SELATAN
18	15/G/2018/PTUN.PLK (PERTANAHAN) DJOKO SUMANTRI, SE MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	4-12-2018	DJOKO SUMANTRI, SE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
19	16/G/2018/PTUN.PLK (PERTANAHAN) 1. ANA JATMO 2. UDIYANTO 3. EDYSON 4. DARSONO MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	11-12-2018	1. ANA JATMO 2. UDIYANTO 3. EDYSON 4. DARSONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

F. PERKARA BANDING YANG PUTUS TAHUN 2018 : 23 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
1	09/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 305/B/2017/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) Drs. DAGUT, SH.,MT MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	03-01-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	Drs. DAGUT, SH.,MT
2	13/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 326/B/2017/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) ARTIN. DKK MELAWAN	16-01-2018	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	ARTIN. DKK

	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA			
3	25/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 348/B/2017/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) ATISTO <u>MELAWAN</u> PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LAHEI MANGKUTUP TAHUN 2017	31-01-2018	ATISTO	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LAHEI MANGKUTUP TAHUN 2017
4	14/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 359/B/2017/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) HAJJAH HERYATI Alias HAJJAH HERYATI MUDJIONO <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	19-02-2018	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	HAJJAH HERYATI ALIAS HAJJAH HERYATI MUDJIONO
5	21/G/2017/PTUN.PLK JO. 27/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) INDAH MULYANI <u>MELAWAN</u> BUPATI PULANG PISAU	14-03-2018	INDAH MULYANI	BUPATI PULANG PISAU
6	17/G/2017/PTUN.PLK JO. 3/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) RACHMADI <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	21-03-2018	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	RACHMADI
7	20/G/2017/PTUN.PLK JO. 4/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) ABDUL HADI <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	21-03-2018	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	ABDUL HADI
8	24/G/2017/PTUN.PLK JO. 89/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) NONONG EKA CHANDRA <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR	16-05-2018	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR

9	31/G/2017/PTUN.PLK JO. 105/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) FRISBOY MELAWAN BUPATI BARITO TIMUR	04-06-2018	BUPATI TIMUR	BARITO	FRISBOY
10	29/G/2017/PTUN.PLK JO. 118/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) WAHYUNI MELAWAN BUPATI KAPUAS	26-06-2018	WAHYUNI		BUPATI KAPUAS
11	32/G/2017/PTUN.PLK JO. 125/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) IMAN MELAWAN BUPATI KAPUAS	13-07-2018	BUPATI KAPUAS		IMAN
12	<u>2/P/PW/2018/PTUN.PLK</u> <u>JO.</u> <u>167/B/PW/2018/PT.TUN.</u> <u>JKT</u>	<u>23-07-2018</u>	<u>Ir. SILAS, ST</u>		
13	1/G/2018/PTUN.PLK JO. 166/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) Ir. SILAS, ST MELAWAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	24-07-2018	Ir. SILAS, ST		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
14	36/G/2017/PTUN.PLK JO. 126/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) YERICHO ABEL MELAWAN BUPATI KAPUAS	13-07-2018	BUPATI KAPUAS		YERICHO ABEL
15	41/G/2017/PTUN.PLK JO. 165/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) WIYOTO MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS; - KAMALA	01-08-2018	WIYOTO		- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR; - KAMALA (T.II INT)
16	42/G/2017/PTUN.PLK JO. 143/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) TOPAN, S.Pd	01-08-2018	TOPAN, S.Pd		1. BUPATI KAPUAS; 2. UGAK, A.Md

	MELAWAN 1. BUPATI KAPUAS; 2. UGAK, A.Md			
17	39/G/2017/PTUN.PLK JO. 142/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) DJAUW HOI MIN Alias HENDRA MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR - ARI YUSTIRIKA. T.II. INT	01-08-2018	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR - ARI YUSTIRIKA. T.II.IN	DJAUW HOI MIN Alias HENDRA
18	4/G/2018/PTUN.PLK JO. 188/B/2018/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) EKO PURWANTO, ST MELAWAN BUPATI SERUYAN	03-09-2018	BUPATI SERUYAN	EKO PURWANTO, ST
19	2/G/2018/PTUN.PLK JO. 186/B/2018/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) SYSWANSYAH, A.Md MELAWAN BUPATI SERUYAN	17-09-2018	BUPATI SERUYAN	SYSWANSYAH, A.Md
20	3/G/2018/PTUN.PLK JO. 187/B/2018/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) TAUFIK RAHMAN, ST MELAWAN BUPATI SERUYAN	25-09-2018	BUPATI SERUYAN	TAUFIK RAHMAN, ST
21	7/G/2018/PTUN.PLK JO. 241/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) SALUNDIK, SH.,MH MELAWAN KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGA PALANGKA RAYA	29-10-2018	KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGA PALANGKA RAYA	SALUNDIK, SH.,MH
22	6/G/2018/PTUN.PLK JO. 231/B/2018/PT.TUN.JKT (LELANG) PT. KARYA ANUGRAH PERSADA MELAWAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI	05-11-2018	PT. KARYA ANUGRAH PERSADA	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

	KALIMANTAN TENGAH			
23	11/G/2018/PTUN.PLK Jo. 261/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) YUDI PUNGAN, SE.,MS MELAWAN KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)	12-11-2018	YUDI PUNGAN, SE.,MS	KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)

G. PERKARA BANDING YANG DICABUT TAHUN 2018 : 0 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL DICABUT	PEMBANDING	TERBANDING
-	---	---	---	---

H. PERKARA KASASI YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2018 : 15 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN KASASI	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
1	09/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 305/B/2017/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) Drs. DAGUT, SH.,MT MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	30-01-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	Drs. DAGUT, SH.,MT
2	13/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 326/B/2017/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) ARTIN. DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	06-02-2018	ARTIN. DKK	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
3	14/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 359/B/2017/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) HAJJAH HERYATI Alias HAJJAH HERYATI MUDJIONO MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWAIRINGI TIMUR	22-03-2018	HAJJAH HERYATI Alias HAJJAH HERYATI MUDJIONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR

4	17/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 3/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) RACHMADI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	23-04-2018	RACHMADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
5	20/G/2017/PTUN.PLK Jo. 4/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) ABDUL HADI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	23-04-2018	ABDUL HADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
6	5/G/KI/2018/PTUN.PLK (KOMISI INFORMASI) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA MELAWAN MEYIWATI	23-04-2018	MEYIWATI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
7	24/G/2017/PTUN.PLK JO. 89/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) NONONG EKA CHANDRA MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR	07-06-2018	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
8	39/G/2017/PTUN.PLK JO. 142/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) DJAUW HOI MIN Alias HENDRA MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	21-08-2018	DJAUW HOI MIN Alias HENDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
9	41/G/2017/PTUN.PLK JO. 165/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) WIYOTO, SH MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS	23-08-2018	WIYOTO, SH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
10	36/G/2017/PTUN.PLK JO. 126/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN)	23-08-2018	YERICHO ABEL	1. BUPATI KAPUAS; 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP RAYA, KECAMATAN

	YERICHO ABEL MELAWAN 1. BUPATI KAPUAS; 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP RAYA, KECAMATAN DADAHUP, KAB. KAPUAS			DADAHUP, KAB. KAPUAS
11	4/G/2018/PTUN.PLK JO. 188/B/2018/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) EKO PURWANTO, S.T MELAWAN BUPATI SERUYAN	24-09-2018	BUPATI SERUYAN	EKO PURWANTO, S.T
12	2/G/2018/PTUN.PLK JO. 186/B/2018/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) SYAWANSYAH, A.Md MELAWAN BUPATI SERUYAN	09-10-2018	BUPATI SERUYAN	SYAWANSYAH, A.Md
13	3/G/2018/PTUN.PLK JO. 187/B/2018/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) TAUFIK RAHMAN, ST MELAWAN BUPATI SERUYAN	17-10-2018	BUPATI SERUYAN	TAUFIK RAHMAN, ST
14	7/G/2018/PTUN.PLK JO. 241/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) SALUNDIK, SH.,MH MELAWAN KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGA PALANGKA RAYA	14-11-2018	SALUNDIK, SH.,MH	KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGA PALANGKA RAYA
15	11/G/2018/PTUN.PLK JO. 261/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) YUDI PUNGAN, SE.,MS MELAWAN KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)	26-11-2018	YUDI PUNGAN, SE.,MS	KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)

I. PERKARA KASASI YANG PUTUS TAHUN 2018 : 11 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
1	35/G/2016/PTUN.PLK Jo. 143/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 61 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) MASA'AD MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	19-02-2018	MASA'AD	KEPALA KANTOR PERTANAHAN PALANGKA RAYA KOTA
2	01/G/2017/PTUN.PLK Jo. 144/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 105 K/TUN/2018 (KEPEGAWAIAN) Ir. FREE MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	06-03-2018	Ir. FREE	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
3	03/G/2017/PTUN.PLK Jo. 200/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 141 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) 1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA. 2. SYAHRUDIN EFFENDI	09-04-2018	1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA. 2. SYAHRUDIN EFFENDI	1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA. 2. SYAHRUDIN EFFENDI
4	04/G/2017/PTUN.PLK Jo. 224/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 177 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) BUDHI DILAN LAMAN MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	09-04-2018	BUDHI DILAN LAMAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
5	11/G/2017/PTUN.PLK Jo. 229/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 170 K/TUN/2018 (KEPEGAWAIAN) DAHLIM BANJARNAHOR MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	09-04-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	DAHLIM BANJARNAHOR
6	27/G/KI/2017/PTUN.PLK Jo. 204 K/TUN/KI/2018 (LAIN-LAIN / AUDIT) KEPALA PERWAKILAN BPKP PROV. KALTENG MELAWAN FAKHRUR RAZIE	02-05-2018	KEPALA PERWAKILAN BPKP PROV. KALTENG	FAKHRUR RAZIE
7	09/G/2017/PTUN.PLK Jo. 305/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 316 K/TUN/2018 (KEPEGAWAIAN)	31-05-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	Drs. DAGUT, SH.,MT

	Drs. DAGUT, SH MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH			
8	5/G/KI/2018/PTUN.PLK Jo. 439 K/TUN/KI/2018 (KOMISI INFORMASI) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA MELAWAN MEYIWATI	30-07-2018	MEYIWATI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
9	17/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 3/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 442 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) RACHMADI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	25-09-2018	RACHMADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
10	20/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 4/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 443 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) ABDUL HADI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	25-09-2018	ABDUL HADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
11	24/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 89/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 529 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) NONONG EKA CHANDRA MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR	16-10-2018	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR

J. PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN TAHUN 2018 : 6 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI	PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI	TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
1	18/G/2014/PTUN.PLK (PERIJINAN) PT. KHARISMA TAMBANG PRIMA MELAWAN 1. BUPATI BARITO TIMUR 2. PT. GUNUNG CAHAYA BERSAMA	PK KE-II 20-02-2018	PT. KHARISMA TAMBANG PRIMA	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. PT. GUNUNG CAHAYA BERSAMA Keterangan : (PK Ke-II) Berkasnya dikembalikan oleh MARI dan kami terima tanggal 30 Mei 2018.
2	30/G/2016/PTUN.PLK Jo. 17/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 308 K/TUN/2017 (PERIJINAN)	30-07-2018	PT. USAHA HANDALAN SEJAHTERA;	BUPATI KAPUAS

	- PT. USAHA HANDALAN SEJAHTERA; - SARKAWI. Dkk MELAWAN BUPATI KAPUAS			
3	03/G/2017/PTUN.PLK Jo. 200/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 141 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) 1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA; 2. SYAHRUDIN EFFENDI (T.II.INT)	15-08-2018	SYAHRUDIN EFFENDI	1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI
4	09/G/2017/PTUN.PLK Jo. 305/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 316 K/TUN/2018 (KEPEGAWAIAN) Drs. DAGUT, SH MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	28-09-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	Drs. DAGUT, SH
5	11/G/2017/PTUN.PLK Jo. 229/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 170 K/TUN/2018 (KEPEGAWAIAN) DAHLIM BANJARNAHOR MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	03-10-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	DAHLIM BANJARNAHOR
6	3/P/FP/2018/PTUN.PLK (PERIJINAN) PT. PRIMA BARA INDONESIA MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	03-10-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	PT. PRIMA BARA INDONESIA

K. PERMOHONAN EKSEKUSI YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2018 : 5 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN EKSEKUSI	PEMOHON EKSEKUSI	TERMOHON EKSEKUSI
1	02/G/2010/PTUN.PLK (PERIJINAN) PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO) MELAWAN BUPATI BARITO UTARA	24-05-2018	PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO)	BUPATI BARITO UTARA

2	12/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) MIRHANUDIN MELAWAN KEPALA DESA BANGKUANG	14-09-2018	MIRHANUDIN	KEPALA DESA BANGKUANG
3	11/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) DAHLIM BANJAR NAHOR, SE.,MSi MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	25-09-2018	DAHLIM BANJAR NAHOR, SE.,MSi	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
4	09/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) Drs. DAGUT, SH MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	23-10-2018	Drs. DAGUT, SH.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
5	31/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) FRISBOY MELAWAN BUPATI BARITO TIMUR	12-12-2018	FRISBOY	BUPATI BARITO TIMUR

KEADAAN PERKARA TAHUN 2019

A. SISA PERKARA THN 2018 : 6 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
01	20/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	19-09-2018	MULIADI, S.Pd	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
02	21/G/2018/PTUN.PLK (PARTAI POLITIK)	10-10-2018	H. AMIR MAHMUD, SE.,MM	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
03	22/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	19-10-2018	KARYADI, SE	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
04	23/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	25-10-2018	READI JUNIANNUR	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
05	24/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	07-12-2018	Ir. BONAPARTEI, M.Sc	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
06	25/G/KI/2018/PTUN.PLK (KI)	12-12-2018	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	MUHAMMAD HABIBI

B. PERKARA MASUK TAHUN 2019 : 38 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/TERMOHON
01	1/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	17-01-2019	SUWAIBATUL ASLAMIYAH. DKK	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
02	2/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	06-02-2019	BUDI, ST	BUPATI MURUNG RAYA
03	3/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	07-02-2019	MELISAE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
04	4/G/2019/PTUN.PLK (DESA)	18-02-2019	EDDY LINCIN	BUPATI GUNUNG MAS
05	5/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	20-02-2019	Hj. HAIMAH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

06	6/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	21-02-2019	Ir. BUDI SANTOSA, MP	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
07	7/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	04-03-2019	ANDREAS, ST.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
08	8/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	11-03-2019	MARDIYANTI	BUPATI KAPUAS
09	9/G/2019/PTUN.PLK (KPALA DESA)	27-03-2019	YULIADE L. RAWING	BUPATI GUNUNG MAS
10	<u>1/P/FP/2019/PTUN.PLK</u>	<u>04-04-2019</u>	<u>PT. LUMBUNG MAKMUR ABADI</u>	<u>KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</u>
11	10/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	10-04-2019	SRI RAHAYU	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN
12	11/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	29-04-2019	Drs. NADIE YENEPI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
13	12/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	02-05-2019	ADJI ASMAN SAMUDIN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
14	13/G/2019/PTUN.PLK (PERIJINAN)	09-05-2019	PT. GAUNG ALAM SEMESTA	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KATINGAN
15	14/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	22-05-2019	H. MALIK MULIAWAN, SH	BUPATI BARITO UTARA
16	15/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	10-06-2019	WANCINO	BUPATI KATINGAN
17	16/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	31-07-2019	LELO ANGGORO, S.STP., MAP	WALIKOTA PALANGKA RAYA
18	17/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	07-07-2019	MUCHAMAT JAINURI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
19	18/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	09-08-2019	ANDI JAYANDI	BUPATI SUKAMARA
20	19/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	09-08-2019	PIRI AHADI	BUPATI SUKAMARA
21	20/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	13-08-2019	MUCHAMAT JAINURI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
22	21/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	15-08-2019	H. MALIK MULIAWAN, SH	BUPATI BARITO UTARA

23	22/G/2019/PTUN.PLK (PERIJINAN)	05-09-2019	PT. GAUNG ALAM SEMESTA	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KATINGAN
24	23/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	10-09-2019	PUJO SULISTIADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
25	24/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	11-09-2019	NOORYANIE DARHAMSyah	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
26	25/G/2019/PTUN.PLK (DESA/LAIN-LAIN)	08-11-2019	MAHAR DEKUI	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG KAJAMEI, KECAMATAN BUKIT RAYA, KABUPATEN KATINGAN
27	26/G/2019/PTUN.PLK (DESA/LAIN-LAIN)	13-11-2019	TATI, S.Pd	1. BUPATI KAPUAS; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HURUNG TAMPIN, KECAMATAN PASAK TALA, KABUPATEN KAPUAS
28	27/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	21-11-2019	Drs. DAGUT, SH.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
29	28/G/2019/PTUN.PLK (DESA)	22-11-2019	H. MAHLIANI	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALANIS, KECAMATAN DUSUN HILIR, KABUPATEN BARITO SELATAN
30	29/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	17-12-2019	ERDI	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
31	30/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	18-12-2019	PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
32	31/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	19-12-2019	ARMAN MUIS	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
33	32/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	20-12-2019	1. ERWIN BARUS; 2. SULAEMAN; 3. KENJI JOSH FRINCEN LEE; 4. HORMAN	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
34	33/G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	23-12-2019	NOOR SARI	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PENDA NANGE, KEC. BUKIT RAYA, KAB. KATINGAN
35	34/G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	23-12-2019	MASTA	1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG KUAI; 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG KUAI
36	35/G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	26-12-2019	1. MENTENG; 2. ERI KUSRINIE 3. JOGO RUSTAMAN; 4. RUSLI	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA RANTAU PUKA, KEC. KATINGAN HULU, KABUPATEN KATINGAN

37	36/G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	30-12-2019	WANCINO	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETAK BAHANDANG, KEC. TASIK PAYAWAN, KAB. KATINGAN
38	37/G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	31-12-2019	ANOM	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HAMPALIT, KEC. KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN

C. PERKARA YANG PUTUS DITAHUN 2019 : 24 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
01	21/G/2018/PTUN.PLK (PARTAI POLITIK)	10-01-2019	H. AMIR MAHMUD, SE.,M	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
02	20/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	16-01-2019	MULIADI, S.Pd	KEPALA KANTOR KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
03	23/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	17-01-2019	READI JUNIANNUR	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
04	22/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	23-01-2019	KARYADI, SE	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
05	25/G/KI/2018/PTUN.PLK (KI)	07-02-2019	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	MUHAMMAD HABIBI
06	24/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	21-03-2019	Ir. BONAPARTEI, M.Sc	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
07	2/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	15-04-2019	BUDI, ST	BUPATI MURUNG RAYA
08	<u>1/P/FP/2019/PTUN.PLK (PERMOHONAN)</u>	<u>07-05-2019</u>	<u>PT. LUMBUNG MAKMUR ABADI</u>	<u>KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</u>
09	3/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	14-05-2019	MELISAE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
10	6/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	23-05-2019	Ir. BUDI SANTOSA, MP	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
11	1/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	28-05-2019	SUWAIBATUL ASLAMIAH. DKK	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

12	4/G/2019/PTUN.PLK (DESA)	13-06-2019	EDDY LINCIN	BUPATI GUNUNG MAS
13	5/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	20-06-2019	Hj. HAIMAH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
14	7/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	11-07-2019	ANDREAS, ST.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
15	9/G/2019/PTUN.PLK (LAIN-LAIN / DESA)	25-07-2019	YULIADE L. RAWING	BUPATI GUNUNG MAS
16	10/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	22-08-2019	SRI RAHAYU	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN
17	11/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	28-08-2019	Drs. NADIE YENEPI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
18	16/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	18-10-2019	LELO ANGGORO, S.STP., MAP	WALIKOTA PALANGKA RAYA
19	18/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	04-11-2019	ANDI JAYANDI	BUPATI SUKAMARA
20	19/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	04-11-2019	PIRI AHADI	BUPATI SUKAMARA
21	20/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	13-11-2019	MUCHAMAT JAINURI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
22	21/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	04-12-2019	H. MALIK MULIAWAN, SH	BUPATI BARITO UTARA
23	25/G/2019/PTUN.PLK (DESA/LAIN-LAIN)	13-12-2019	MAHAR DEKUI	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG KAJAMEI, KECAMATAN BUKIT RAYA, KABUPATEN KATINGAN
24	23/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	18-12-2019	PUJO SULISTIADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

D. PERKARA YANG DICABUT DI TAHUN 2019 : 6 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL DICABUT	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
01	8/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	12-03-2019	MARDIYANTI	BUPATI KAPUAS

02	12/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	03-05-2019	ADJI ASMAN SAMUDIN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
03	13/G/2019/PTUN.PLK (PERIJINAN)	09-05-2019	PT. GAUNG ALAM SEMESTA	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KATINGAN
04	14/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	23-05-2019	H. MALIK MULIAWAN, SH	BUPATI BARITO UTARA
05	15/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	09-07-2019	WANCINO	BUPATI KATINGAN
06	17/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	08-08-2019	MUCHAMAT JAINURI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

E. PERKARA BANDING YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2019 : 16 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
01	21/G/2018/PTUN.PLK (PARTAI POLITIK) H. AMIR MAHMUD, SE.,MM MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	23-01-2019	H. AMIR MAHMUD, SE.,MM	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
02	20/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) MULIADI, S.Pd MELAWAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	25-01-2019	MULIADI, S.Pd	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
03	24/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) Ir. BONAPARTEI, M.Sc MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	02-04-2019	Ir. BONAPARTEI, M.Sc	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
04	3/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN) MELISAE MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	24-05-2019	MELISAE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

05	6/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) Ir. BUDI SANTOSA, MP MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	28-05-2019	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	Ir. BUDI SANTOSA, MP
06	1/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN) SUWAIBATUL ASLAMIYAH. DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	31-05-2019	SUWAIBATUL ASLAMIYAH. DKK	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
07	4/G/2019/PTUN.PLK (DESA) EDDY LINCIN MELAWAN BUPATI GUNUNG MAS	25-06-2019	EDDY LINCIN	BUPATI GUNUNG MAS
08	5/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN) Hj. MAIMAH MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA. - MAULIDA /T.II.INT.	03-07-2019	MAULIDA /T.II.INT	Hj. MAIMAH (PERTANAHAN)
09	7/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) ANDREAS, ST.,MT MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	22-07-2019	ANDREAS, ST.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
10	9/G/2019/PTUN.PLK (LAIN-LAIN / DESA) YULIADE L. RAWING MELAWAN 1. BUPATI GUNUNG MAS 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG SURUK	06-08-2019	YULIADE L. RAWING	1. BUPATI GUNUNG MAS 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG SURUK
11	11/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN) Drs. NADIE YENEPI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU	05-09-2019	Drs. NADIE YENEPI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
12	16/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) LELO ANGGORO, S.STP., MAP	30-10-2019	LELO ANGGORO, S.STP., MAP	WALIKOTA PALANGKA RAYA

	MELAWAN WALIKOTA PALANGKA RAYA			
13	18/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) ANDI JAYANDI MELAWAN BUPATI SUKAMARA	13-11-2019	ANDI JAYANDI	BUPATI SUKAMARA
14	19/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) PIRI AHADI MELAWAN BUPATI SUKAMARA	13-11-2019	PIRI AHADI	BUPATI SUKAMARA
15	20/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN) MUCHAMAT JAINURI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	18-11-2019	MUCHAMAT JAINURI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
16	21/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) H. MALIK MULIAWAN, SH MELAWAN BUPATI BARITO UTARA	17-12-2019	H. MALIK MULIAWAN, SH	BUPATI BARITO UTARA

F. PERKARA BANDING YANG PUTUS TAHUN 2019 : 14 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
01	14/G/2018/PTUN.PLK. Jo. 13/B/2019/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) TOTO HARTONO, SH.,MP MELAWAN BUPATI BARITO SELATAN	18-02-2019	TOTO HARTONO, SH.,MP	BUPATI BARITO SELATAN
02	15/G/2018/PTUN.PLK. Jo. 51/B/2019/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) DJOKO SUMANTRI, SE MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	28-03-2019	DJOKO SUMANTRI, SE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
03	16/G/2018/PTUN.PLK. Jo. 52/B/2019/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) ANA JATMO. DKK MELAWAN KEPALA BPN / TATA RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	10-04-2019	ANA JATMO. DKK	KEPALA BPN / TATA RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
04	20/G/2018/PTUN.PLK. Jo. 94/B/2019/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) MULIADI, S.Pd MELAWAN	09-05-2019	MULIADI, S.Pd	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR			
05	21/G/2018/PTUN.PLK. Jo. 95/B/2019/PT.TUN.JKT (PARTAI POLITIK) AMIR MAHMUD, SE.,MM MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	09-05-2019	AMIR MAHMUD, SE.,MM	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
06	24/G/2018/PTUN.PLK. Jo. 166/B/2019/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) Ir. BONAPARTEI, M.Sc MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	25-06-2019	Ir. BONAPARTEI, M.Sc	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
07	6/G/2019/PTUN.PLK. Jo. 218/B/2019/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) Ir. BUDI SANTOSA, MP MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	29-08-2019	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	Ir. BUDI SANTOSA, MP
08	3/G/2019/PTUN.PLK. Jo. 217/B/2019/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) MELISAE MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	09-09-2019	MELISAE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
09	1/G/2019/PTUN.PLK. Jo. 216/B/2019/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) 1. SUWAIBATUL ASLAMIYAH 2. MUHAMMAD TRI RAMDHANI 3. MUHAMMAD RAYA AKBAR MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	10-09-2019	1. SUWAIBATUL ASLAMIYAH 2. MUHAMMAD TRI RAMDHANI 3. MUHAMMAD RAYA AKBAR	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
10	5/G/2019/PTUN.PLK. Jo. 259/B/2019/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) Hj. MAIMAH MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA. - MAULIDA /T.II.INT.	11-10-2019	MAULIDA /T.II.INT	Hj. MAIMAH
11	4/G/2019/PTUN.PLK (DESA) EDDY LINCIN	23-10-2019	EDDY LINCIN	BUPATI GUNUNG MAS

	MELAWAN BUPATI GUNUNG MAS			
12	7/G/2019/PTUN.PLK Jo. 261/B/2019/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) ANDREAS, ST.,MT MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	13-11-2019	ANDREAS, ST.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
13	9/G/2019/PTUN.PLK Jo. 277/B/2019/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN / DESA) YULIADE L. RAWING MELAWAN 1. BUPATI GUNUNG MAS; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG SURUK	04-12-2019	YULIADE L. RAWING	1. BUPATI GUNUNG MAS; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG SURUK
14	11/G/2019/PTUN.PLK Jo. 302/B/2019/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) Drs. NADIE YENEPI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU	16-12-2019	Drs. NADIE YENEPI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU

G. PERKARA BANDING YANG DICABUT TAHUN 2019 : - PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL DICABUT	PEMBANDING	TERBANDING
-	-	-	-	-

H. PERKARA KASASI YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2019 : 8 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN KASASI	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
01	<u>25/G/KI/2018/PTUN.PLK</u> <u>(KI)</u> <u>KEPALA KANTOR</u> <u>WILAYAH BADAN</u> <u>PERTANAHAN NASIONAL</u> <u>PROVINSI KALIMANTAN</u> <u>TENGAH</u> MELAWAN MUHAMMAD HABIBI	<u>15-02-2019</u>	<u>MUHAMMAD</u> <u>HABIBI</u>	<u>KEPALA KANTOR WILAYAH</u> <u>BADAN PERTANAHAN</u> <u>NASIONAL PROVINSI</u> <u>KALIMANTAN TENGAH</u>
02	14/G/2018/PTUN.PLK Jo. 13/B/2019/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) TOTO HARTONO, SH.,MP MELAWAN BUPATI BARITO SELATAN	12-03-2019	TOTO HARTONO, SH.,MP	BUPATI BARITO SELATAN

03	15/G/2018/PTUN.PLK Jo. 51/B/2019/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) DJOKO SUMANTRI, SE MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	16-04-2019	DJOKO SUMANTRI, SE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
04	16/G/2018/PTUN.PLK Jo. 52/B/2019/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) ANA JATMO. DKK MELAWAN KEPALA BPN / TATA RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	07-05-2019	ANA JATMO. DKK	KEPALA BPN / TATA RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
05	24G/2018/PTUN.PLK. Jo. 166/B/2019/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) Ir. BONAPARTEI, M.Sc MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	17-07-2019	Ir. BONAPARTEI, M.Sc	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
06	1/G/2019/PTUN.PLK. Jo. 216/B/2019/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) 1. SUWAIBATUL ASLAMIYAH 2. MUHAMMAD TRI RAMDHANI 3. MUHAMMAD RAYA AKBAR MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	02-10-2019	1. SUWAIBATUL ASLAMIYAH 2. MUHAMMAD TRI RAMDHANI 3. MUHAMMAD RAYA AKBAR	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
07	5/G/2019/PTUN.PLK. Jo. 259/B/2019/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) Hj. MAIMAH MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA. - MAULIDA /T.II.INT.	04-11-2019	MAULIDA /T.II.INT	Hj. MAIMAH
08	7/G/2019/PTUN.PLK Jo. 261/B/2019/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) ANDREAS, ST.,MT MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	03-12-2019	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	ANDREAS, ST.,MT

I. **PERKARA KASASI YANG PUTUS TAHUN 2019 : 8 PERKARA**

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
01	39/G/2017/PTUN.PLK Jo. 142/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 16 K/TUN/2019 (PERTANAHAN) DJAUW HOIMIN Alias HENDRA MELAWAN KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	11-02-2019	DJAUW HOIMIN Alias HENDRA	KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
02	4/G/2018/PTUN.PLK Jo. 188/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 42 K/TUN/2019 (KEPEGAWAIAN) EKO PURWANTO, ST MELAWAN BUPATI SERUYAN	19-02-2019	BUPATI SERUYAN	EKO PURWANTO, ST
03	2/G/2018/PTUN.PLK Jo. 186/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 69 K/TUN/2019 (KEPEGAWAIAN) SYSWANSYAH, A.Md MELAWAN BUPATI SERUYAN	19-02-2019	BUPATI SERUYAN	SYSWANSYAH, A.Md
04	3/G/2018/PTUN.PLK Jo. 187/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 88 K/TUN/2019 (KEPEGAWAIAN) TAUFIK RAHMAN, S.T MELAWAN BUPATI SERUYAN	19-02-2019	BUPATI SERUYAN	TAUFIK RAHMAN, S.T
05	11/G/2018/PTUN.PLK Jo. 261/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 158 K/TUN/2019 (LAIN-LAIN) YUDI PUNGAN, SE.,MS MELAWAN KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)	18-03-2019	YUDI PUNGAN, SE.,MS	KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)
06	25/G/KI/2018/PTUN.PLK Jo. 262 K/TUN/KI/2019 (PERTANAHAN) KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MELAWAN	23-05-2019	MUHAMMAD HABIBI	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

	MUHAMMAD HABIBI			
07	14/G/2018/PTUN.PLK Jo. 13/B/2019/PT.TUN.JKT Jo. 318 K/TUN/2019 (KEPEGAWAIAN) TOTO HARTONO, SH.,MP MELAWAN BUPATI BARITO SELATAN	27-06-2019	TOTO HARTONO, SH.,MP	BUPATI BARITO SELATAN
08	15/G/2018/PTUN.PLK Jo. 51/B/2019/PT.TUN.JKT Jo. 365 K/tun/2019 (PERTANAHAN) DJOKO SUMANTRI, SE MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWAIRINGI TIMUR - YUSPIANSYAH, ST (T.II.INT)	26-09-2019	YUSPIANSYAH, ST (T.II.INT)	DJOKO SUMANTRI, SE

J. PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN TAHUN 2019 : 1 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI	PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI	TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
1	4/G/2019/PTUN.PLK Jo. 248/B/2019/PT.TUN.JKT	12-12-2019	EDDY LINCIN	1. BUPATI GUNUNG MAS; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUYUN; 3. TITI (T.II.INT)

K. PERMOHONAN EKSEKUSI YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2019 : 5 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN EKSEKUSI	PEMOHON EKSEKUSI	TERMOHON EKSEKUSI
1	2/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) BUDI, ST MELAWAN BUPATI MURUNG RAYA	08-08-2019	BUDI, ST	BUPATI MURUNG RAYA
2	2/G/2018/PTUN.PLK Jo. 186/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 69 K/TUN/2019 (KEPEGAWAIAN) SYSWANSYAH, A.Md MELAWAN BUPATI SERUYAN	23-08-2019	SYSWANSYAH, A.Md	BUPATI SERUYAN
3	3/G/2018/PTUN.PLK Jo. 187/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 88 K/TUN/2019 (KEPEGAWAIAN) TAUFIK RAHMAN, S.T MELAWAN BUPATI SERUYAN	20-10-2019	TAUFIK RAHMAN, S.T	BUPATI SERUYAN

4	4/G/2018/PTUN.PLK Jo. 188/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 42 K/TUN/2019 (KEPEGAWAIAN) EKO PURWANTO, ST <u>MELAWAN</u> BUPATI SERUYAN	25-10-2019	EKO PURWANTO, ST	BUPATI SERUYAN
5	39/G/2017/PTUN.PLK Jo. 142/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 16 K/TUN/2019 (PERTANAHAN) DJAUW HOIMIN ALIAS. HENDRA <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	09-12-2019	DJAUW HOIMIN ALIAS. HENDRA	KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR